Rencana Kerja Disdukcapil Kota Pekalongan 2024

Jl. Majapahit No.18
(0285) 422814
0856 4055 7650
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id
dindukcapil.pekalongankota@gmail.com

disdukcapilkotapkl
@disdukcapilkotapkl
Disdukcapil Kota Pekalongan
Linktr.ee/layanan_dukcapil33775

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa #GISA GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

EXECUTIVE SUMMARY

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan perencanaan tahunan unit kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dalam rangka penyusunan RAPBD.

Capaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan target IKU tahun 2022 hingga 2023 semester I adalah sebagai berikut :

Indikator		**Realisasi**		**Keterangan**
		Tahun 2022	**Tahun 2023 s/d semester I**	
1	Nilai AKIP OPD	82,50	n/a	-
2	Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	81,59	82,52	-

Adapun pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Program	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	89,33%
	- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
2	Pendaftaran Penduduk	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	83,80%
3	Pencatatan Sipil	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	79,37%
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	7 OPD

Masalah utama yang harus segera diselesaikan pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2023 adalah :

1. Target Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Kota Pekalongan.
2. Pencetakan KTP-el telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, merupakan suatu upaya mempercepat proses pencetakan KTP-el.
3. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang merupakan target IKU Disdukcapil Kota Pekalongan melalui kegiatan Perjanjian Kerjasama, Sosialisasi dan Jemput Bola.

Demikian Renja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pekalongan, 20 September 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil Kota Pekalongan

SLAMET HARIYADI, SH.,M.Hum.
NIP 19650204 198603 1 016

DAFTAR ISI

Executive Summary i
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Lampiran vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capain Renstra Perangkat Daerah 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37
BAB V PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan……. 14

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan ……. 21

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Disdukcapil Kota Pekalongan Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024…..……. 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Usulan Program/Kegiatan Disdukcapil Kota Pekalongan dari Pemangkut Kepentingan Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali sterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.

Menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Renja Kementrian/Lembaga, Renja Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun serangkaian dokumen kerja yaitu Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan membuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya (tahun 2024) yang dicukupi dengan formulir kerangka anggaran serta indikasi pembiayaan 1 tahun kedepan.

Secara ringkas alur pikir dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

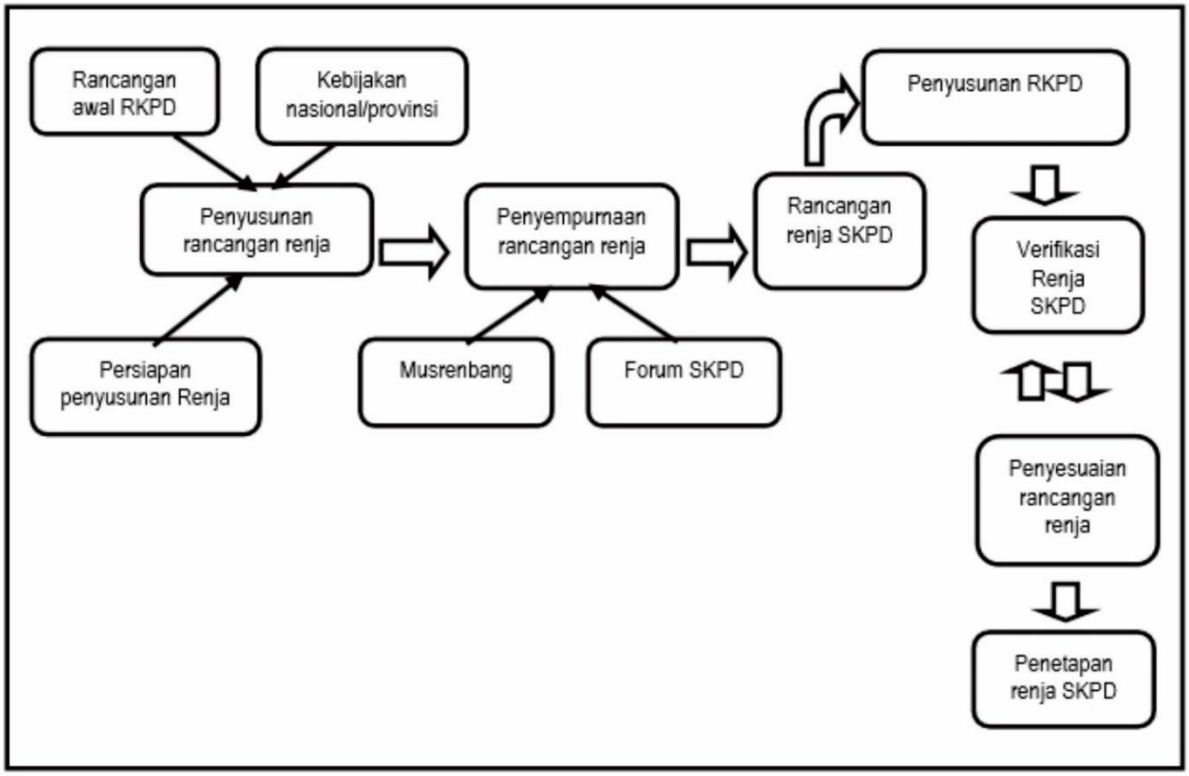

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
33. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

34. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 20204 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan resmi sekaligus merupakan acuan pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2024 yaitu :

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
d. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Untuk menyediakan satuan acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD kota Pekalongan;
f. Untuk menyediakan satu tolok ukur APBD Kota Pekalongan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen Renja dengan dokumen rencana Pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan renstra, serta sistematika dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat rencana program dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periodesasi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan catatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja untuk tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan beserta perkiraan capaian atau hasil yang akan diperoleh tahun 2023, diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut. Termasuk juga akan diuraikan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Dalam tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai 4 Program 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, dimana program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target yang direncanakan.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan realisasi renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target Perubahan Renja 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/4)	11
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Rata-Rata Ketercapaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persen	88,75	-	-	81,77	83,80	83,80	94,42	Belum Tercapai
	- Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	dokumen	425.259	-	-	384.336	374.186	374.186	87,99	Belum Tercapai
2	Rata-Rata Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil	persen	94	-	-	93,40	79,37	79,37	84,44	Belum Tercapai
	- Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	dokumen	41.886	-	-	6.981	8.870	8.870	21,18	Belum Tercapai
3	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (IKK Outcome)	OPD	14	-	-	7	7	7,00	50,00	Belum Tercapai
	- Penyajian Data Kependudukan (IKK Output)	kali	2	-	-	2	2	2	100,00	Tercapai
Non Urusan										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	-	-	100	89,33	89,33	89,33	Belum Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	67	67	66,67	Belum Tercapai
	- Persentasae Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	101	101	101,32	Melebihi Target
	- Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai

Dari tabel rekapitulasi di atas terdapat beberapa program/kegiatan yang belum tercapai, adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian program/kegiatan antara lain :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, ketidaktercapaian disebabkan karena tidak semua OPD diikutsertakan dalam acara pekan batik.
2. Pada Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, ketidaktercapaian disebabkan karena terjadinya peristiwa Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya penduduk meninggal dunia, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya capaian penerbitan dokumen dafduk (KK), dan kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan (KK) hanya pada saat membutuhkan untuk keperluan administrasi (mengurus BPJS, Asuransi dan Perbankan).

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, antara lain :

1. Adanya inovasi paket layanan adminduk terintegrasi “SIJALU” yang artinya mengurus satu dokumen kependudukan (akta kelahiran) otomatis mendapat dokumen kependudukan lain (KK dan KIA);
2. Adanya MoU/kerjasama dengan rumah sakit dan BLUD puskesmas rawat inap untuk pelaporan akta kelahiran baru (jenis pelayanan jemput bola);
3. Pelayanan pada hari libur (hari Sabtu).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan ini merupakan ukuran keberhasilan, kualitatif dan kuantitatif guna pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi pemerintah daerah serta memperjelas arah kemajuan Pembangunan berkesinambungan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023*)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Perekaman KTP Elektronik		Outcome	95,20%	95,40%	95,60%	95,80%	99,81%	96,19%	95,60%	95,80%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yamg memiliki KIA		Outcome	55%	60%	65%	70%	102,49%	91,20%	65%	70%	
3	Kepemilikan akta kelahiran		Outcome	93,10%	93,20%	93,30%	93,40%	105,82%	106,44%	93,30%	93,40%	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatakan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Outcome	7	9	10	12	7	7	10	12	
5	Penerbitan akta perkawinan		Output	50	50	50	50	52	42	50	50	
6	Penerbitan akta perceraian		Output	10	10	10	10	9	4	10	10	
7	Penerbitan akta kematian		Output	3225	3225	3225	3225	3020	1547	3225	3225	
8	Penyajian data kependudukan		Output	2	2	2	2	2	1	2	2	

Keterangan : *) Realisasi capaian tahun 2023 menggunakan data RKPD Triwulan II 2023.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, hambatan, kekuatan dan peluang.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Disdukcapil dapat dilihat dari banyaknya inovasi dalam pelaksanaan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dengan Program-Program Unggulan : Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mendukung GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) melalui inovasi atau upaya, sebagai berikut :

1. Inovasi JARUM EMAS (Jadi Antar Rumah Menyenangkan Masyarakat), berupa layanan antar produk ke rumah pemohon kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
2. Inovasi APEL JOS (Anak Pelajar, Jompo dan Orang Sakit), berupa layanan jemput bola perekaman KTP-el.
3. Inovasi SIJALU (Siji Aweh Telu), paket layanan adminduk terintegrasi (akta kelahiran, KK dan KIA).
4. Pelayanan di hari libur (hari Sabtu).
5. Kerjasama dengan RS dan BLUD Puskesmas rawat inap, berupa pelayanan jemput bola akta kelahiran baru.
6. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
7. Layanan melalui media sosial dan *website.*

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara teknis ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Sering dijumpai penambahan atau pengurangan data dalam dokumen kependudukan yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat.
2. Adanya persepsi Masyarakat bahwa pembuatan/pengurusan administrasi kependudukan rumit.
3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dan manipulasi dokumen serta hak akses Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum dimanfaatkannya secara optimal dan Adminduk dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
2. Pengadaan blangko KTP-el seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga memperlambat proses pencetakan KTP-el di daerah.
3. SOTK yang ada belum sesuai dengan ketentuan PP nomor 18 tahun 2016, karena belum adanya UPT Dinas.

Kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang, antara lain :

1. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis Teknologi Informatika (TI) dengan pengoperasian SIAK sampai ditingkat Kecamatan, mempercepat permintaan/kebutuhan layanan Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan sehingga dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan.
2. Penghapusan Retribusi/Biaya untuk Pelayanan Surat dan Dokumen Kependudukan, sehingga semua pengurusan Pelayanan Surat dan Dokumen Kependudukan gratis.
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk akan mempermudah pemberian pelayanan pendaftaran kependudukan yang cepat, murah, dan mudah serta

akurat. Hal ini menjadikan modal adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

4. Tersedianya data base kependudukan dalam pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk akan lebih mudah diakses dengan adanya kemajuan dibidang tekhnologi informasi dan akan mendeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk).
5. Adanya Komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk pelaksanaan pembenahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Keberadaan Operator di tingkat Kecamatan yang memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui pembuatan KTP/KK.
7. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem administrasi kependudukan.
8. Kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, dinas terkait yang baik dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Sertifikasi ISO 9001: 2015 sebagai bukti tersertifikasinya standar operasional pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun tidak.

Kelemahan dan tantangan untuk dihadapi :

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan. Hal ini berpengaruh terhadap Penyediaan Data Base Kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan Kebijakan Pembangunan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan/pembaharuan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan data perkembangan kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan Kebijakan Pembangunan.

3. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi proses pelayanan Penerbitan Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi (TI).
4. Keterbatasan anggaran, karena tidak adanya anggaran DAK dari pusat dan terbatasnya anggaran APBD yang disebabkan adanya refocusing anggaran.

Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelaporan perubahan/pembaharuan data pada dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui iklan layanan masyarakat dan sosial media.
3. Pemanfaatan seoptimal mungkin bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota baik yang berupa sarana prasarana dan anggaran.
4. Bekerja sama dengan stakeholder, masyarakat, lembaga keagamaan, dan berbagai sektor agar program Pencatatan Sipil dan Kependudukan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

Isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024, antara lain :

1. Melakukan Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan target Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 25% dari 277 Juta penduduk Indonesia memakai Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mana target tersebut berlaku bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Penerapan ISO 27001-2013 bagi unit pengguna terkait manajemen keamanan data informasi sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamananan Informasi.
3. Sejak tanggal 1 Januari 2015 KTP-el bisa dicetak di daerah Kota/Kabupaten. Namun untuk pengadaan blangko KTP-el tetap dilaksanakan oleh

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Penjelasannya pada pasal 5 huruf (f).

4. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemutakhiran data ke lapangan pada setiap periode tertentu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Menyusun Rencana Strategis Disdukcapil Kota Pekalongan berpedoman pada misi ketujuh yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*” untuk menuju visi :

“Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”.

Untuk mencapai visi Kota Pekalongan tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kuru waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial dan budaya suatu daerah.

Rencana Strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahun masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada rancangan awal Renstra dengan memperhatikan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan, pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Disdukcapil Kota Pekalongan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang didukung oleh dana baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Kebutuhan dana tersebut harus selalu dianalisis terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Analisis kebutuhan dana ini dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan Rancangan RKPD. Dalam Tabel T-C.31 dibawah, dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan kebutuhan dananya dengan pagu indikatif Rancangan RKPD.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
X.XX.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**KOTA PEKALONGAN**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**5.120.953.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**KOTA PEKALONGAN**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**5.120.953.000**	
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**31.194.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**31.194.000**	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 dokumen	2.750.000	

X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.650.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	26.794.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	26.794.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen		
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen		
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan		

X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	68.247.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	68.247.050	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	2 kali	9.500.000	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	2 kali	9.500.000	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah pelatihan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	1 kali	12.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah pelatihan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	1 kali	12.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pelaksanaan publikasi	12 bulan	46.747.050	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pelaksanaan publikasi	12 bulan	46.747.050	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	1.287.923.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	1.287.923.950	

X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.500.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	1.102.923.950	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	1.102.923.950	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 unit			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 unit		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.500.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.500.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	35.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	35.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	36 orang/kali	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	36 orang/kali	100.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.289.824.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.289.824.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	3.225.174.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	3.225.174.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	63.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	63.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	293.278.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	293.278.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	110.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	110.100.000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12 bulan	180.178.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12 bulan	180.178.000	

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150.486.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150.486.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan	56.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan	56.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	4 unit	23.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	4 unit	23.000.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	71.486.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	71.486.000	

02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**85,30 persen**	330.857.000	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**85,30 persen**	330.857.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**404.772 dokumen**	330.857.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**404.772 dokumen**	330.857.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	95,6 persen	263.357.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	95,6 persen	263.357.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan KK	30.200 KK			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan KK	30.200 KK		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO	1 dokumen	31.500.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO	1 dokumen	31.500.000	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Presentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	65 persen	36.000.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Presentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	65 persen	36.000.000	

02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,70 persen**	275.826.000	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,70 persen**	275.826.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 dokumen	275.826.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil		275.826.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penerbitan akta kematian (IKK Outcome)	3.225 akta kematian	263.826.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penerbitan akta kematian (IKK Outcome)	3225 akta kematian	263.826.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)	93,3 pesen			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)	93,3 persen		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penerbitan akta perceraian (IKK Output)	10 akta perceraian	12.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penerbitan akta perceraian (IKK Output)	10 akta perceraian	12.000.000	
			Penerbitan akta perkawinan (IKK Output)	50 akta perkawinan				Penerbitan akta perkawinan (IKK Output)	50 akta perkawinan		

02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**10 OPD**	123.485.000	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome**	**10 OPD**	123.485.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	123.485.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	123.485.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (penyajian data kependudukan)	110 buku	26.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (penyajian data kependudukan)	110 buku	26.000.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah rapat koordinasi pelaporan kependudukan yang dilaksanakan	2 kali			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah rapat koordinasi pelaporan kependudukan yang dilaksanakan	2 kali		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	1 kali	75.485.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	1 kali	75.485.000	

2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	112 buku	22.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	112 buku	22.000.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	5600 berkas			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	5600 berkas		
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah fumigasi arsip	1 kali			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah fumigasi arsip	1 kali		
TOTAL PAGU					**5.851.121.000**					**5.851.121.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan akan menampung, bila ada usulan progam/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Namun sampai dengan saat ini belum ada usulan progam/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lampiran III matrik pembangunan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan yaitu **program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.** Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data base kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang di dukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependududkan (SIAK) terpadu secara nasional.

Dalam RPJMN telah ditetapkan beberapa Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024. Dalam Agenda Pembangunan Nasional terdapat Visi dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan antara lain :

1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7) Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Diantara 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi berkontribusi pada agenda

pembangunan ke tujuh yang berbunyi : Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimana korelasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk serta memperkuat tata kelola kependudukan, dimana tata kelola kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan dalam suatu daerah.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu :

1. Perubahan SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat;
2. Pengembangan layanan adminduk digital dalam genggaman (IKD);
3. Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DAK 2 untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif 2024;
4. Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilkada serentak tahun 2024;
5. Pendataan adminduk penyandang disabilitas;
6. Pendataan kemiskinan ekstrim;
7. Penerapan buku pokok pemakaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar telah melaksanakan 4 (empat) dari 7 (tujuh) kegiatan strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Perubahan SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, Pengembangan layanan adminduk digital dalam genggaman, Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilkada serentak tahun 2024 dan pendataan adminduk penyandang disabilitas, hal tersebut selaras dengan visi Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”.** Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melaksanakan misi ketujuh yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan Renja

Tujuan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2024. Sejalan dengan itu maka tujuan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik. Hal ini tercantum dalam Misi ketujuh Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026 yang berbunyi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

B. Sasaran Renja

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026, disebutkan perihal prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan.

Prioritas pembangunan tersebut yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan yang kedua yaitu : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi. Prioritas pembangunan ini menetapkan beberapa sasaran yang diantaranya merupakan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
- Terselenggaranya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelayanan.
- Terwujudnya perencanaan, pertanggungjawaban kinerja dan keuangan.
- Tercapainya target perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengaduan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan data base kependudukan yang akurat.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan akan merencanakan 4 Program 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan,

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada RKPD Tahun 2024 dan disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periodesasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**			
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Capil**			
X.XX.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**5.001.122.000**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.564.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.088.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.476.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.313.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**
X.XX.01.2.05.02	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	5.000.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5.313.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	51 orang

X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**904.297.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100%**
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.500.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	736.437.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.500.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	36.360.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83.000.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan

X.XX.01.2.01.07	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.636.751.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.574.083.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	61.300.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.368.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**269.447.000**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.500.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.947.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan

X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**164.750.000**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.195.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.555.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	27 unit
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**354.829.000**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**83,53%**
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	354.829.000	**Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**394.529 dokumen**
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	311.208.000	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	46000 dokumen
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.471.000	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 laporan
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26.150.000	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	2 laporan

02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**328.970.000**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,70**
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	328.970.000	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6.981 dokumen
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	311.350.000	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	9285 dokumen
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17.620.000	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	1 layanan
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**95.088.000**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**10 OPD**
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.088.000	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.230.000	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.350.000	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	1 kali
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	41.508.000	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1 dokumen

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 di susun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Perencanaan kinerja sebagai dasar untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya konkret untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan, dan selanjutnya menjadi semakin terbuka dalam mewujudkan terciptanya kondisi ketenangan kerja. Keberhasilan operasional perencanaan sangat tergantung pada komitmen penuh dari seluruh komponen, melalui proses saling komunikasi timbal balik dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai bahan penyusunan RAPBD dan rencana kegiatan prioritas pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas, akuntanbilitas, transparasi pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah.

Masalah utama yang harus segera diselesaikan pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2024 adalah:

1. Target Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Kota Pekalongan.
2. Pencetakan KTP-el telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, merupakan suatu upaya mempercepat proses pencetakan KTP-el.

3. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang merupakan target IKU Disdukcapil Kota Pekalongan melalui kegiatan Perjanjian Kerjasama, Sosialisasi dan Jemput Bola.

Pekalongan, 20 September 2023

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

SLAMET HARYADI, SH.M.Hum.
NIP 19650204 198603 1 016

LAMPIRAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**5.780.009.000,00**							**5.833.147.598,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.780.009.000,00**							**5.833.147.598,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.780.009.000,00**							**5.833.147.598,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah***	**100,00 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100,00 persen 100,00 persen**			**100 persen**	**5.001.122.000,00**						**100,00 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.093.941.598,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 Persen	15.564.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	37.919.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.088.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		10.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.476.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		25.519.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	3.636.751.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	3.319.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.574.083.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		3.255.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.300.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.368.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 Persen	10.313.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	20.487.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		9.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				51 Orang	5.313.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		10.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	904.297.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	1.275.267.598,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	736.437.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.085.767.598,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	36.360.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		39.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	83.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	269.447.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	291.304.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		110.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.947.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		178.204.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	164.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	149.074.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	73.195.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	66.555.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		70.074.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk***	**88,75 persen**			**85,30 persen**	**354.829.000,00**						**88,75 persen**	**336.070.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk*	425259 dokumen			404772 dokumen	354.829.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	425259 dokumen	336.070.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				46000 Dokumen	311.208.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		268.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	17.471.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	26.150.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		36.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil***	**94,00 persen**			**93,70 persen**	**328.970.000,00**						**94,00 persen**	**279.699.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil*	41886 dokumen			6981 dokumen	328.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	6981 dokumen	279.699.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9285 Dokumen	311.350.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		267.699.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	17.620.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)***	**14,00 OPD**			**10,00 OPD**	**95.088.000,00**						**14,00 OPD**	**123.437.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Penyajian data kependudukan (IKK Output)*	2 kali			2 kali	95.088.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	2 kali	123.437.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	27.230.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	26.350.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		75.437.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	41.508.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**5.780.009.000,00**							**5.833.147.598,00**	